



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA**

# **KEBIJAKAN UMUM APBD**

---

**TAHUN ANGGARAN  
2025**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : B-1711/BPKAD/BAN.1/074/08/2024  
NOMOR : P-3403/SET.DPRD/FP/900.1/08/2024**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Edi Damansyah, M.Si  
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Mongonsidi Gedung B Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Kartanegara

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

- 2 a. Nama : Abdul Rasid, SE.,M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Mongonsidi Tenggarong
- b. Nama : H. Alif Turiadi, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Mongonsidi Tenggarong
- c. Nama : Didik Agung Eko Wahono, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Mongonsidi Tenggarong

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2025

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Selaku,  
PIHAK PERTAMA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Tenggarong, Tanggal, 09 Agustus 2024

PIMPINAN DPRD



Kabupaten Kutai Kartanegara  
Selaku,  
PIHAK KEDUA

ABDUL RASID, SE., M.Si

KETUA

H. ALIF TURIADI, SE

WAKIL KETUA

DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE

WAKIL KETUA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 89 ayat (1) dari peraturan tersebut mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan KUA dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Tema yang diangkat untuk KUA Tahun Anggaran 2025 adalah "Pemerataan Pembangunan Daerah dan Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan". Tema ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memastikan pembangunan yang merata serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat dan mentransformasi pembangunan di daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026. Sebagai periode pembangunan pada dua tahun terakhir sebelum RPJMD berakhir, berbagai program pembangunan yang direncanakan pada tahun 2025 diharapkan mampu menunjukkan progress yang signifikan sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, penyusunan KUA dan PPAS menjadi sangat krusial untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan tersebut.

Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan tema "Pemerataan Pembangunan Daerah dan Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan", diharapkan berbagai program dan kebijakan yang diimplementasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kutai Kartanegara.

## 1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Maksud dari penyusunan KUA Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan ini didasarkan pada komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga daerah dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun tujuan spesifik dari penyusunan KUA tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### 1. Pemerataan Pembangunan

- Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah; Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
- Peningkatan Infrastruktur; Melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat.

### 2. Inklusivitas dalam Pembangunan

- Pemberdayaan Masyarakat; Memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui program pemberdayaan yang efektif dan partisipatif.
- Penguatan Ekonomi Lokal; Mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- Akses Layanan Publik; Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

### 3. Pembangunan yang Berkelanjutan

- Inovasi dan Teknologi: Memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta mendukung inisiatif pembangunan hijau dan ramah lingkungan.

- Pengurangan Risiko Bencana; Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur dari potensi ancaman bencana alam.
4. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
- Pendidikan dan Keterampilan; **Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di era globalisasi.**
  - Kesehatan dan Kesejahteraan; Memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan program kesejahteraan sosial untuk memastikan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi semua warga.
5. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan; Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.
  - Evaluasi dan Pengawasan; Menerapkan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, Rancangan KUA Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA**

Penyusunan KUA Tahun Anggaran ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.



## BAB II

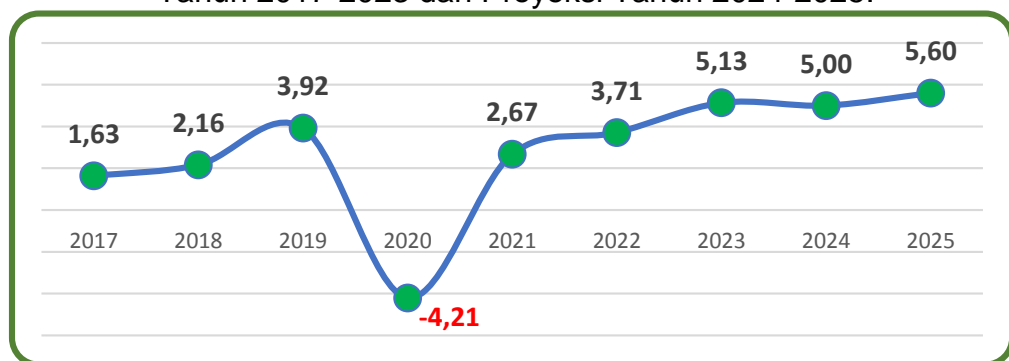
### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi LPE

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan performa yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi global, termasuk dampak pandemi COVID-19. Dalam periode sebelum pandemi (2017-2022), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara relatif stabil dengan angka rata-rata antara 1,6% hingga 3,71% per tahun. Bahkan, pasca pandemi, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara mampu pulih dengan cepat dan mencatatkan pertumbuhan yang positif, menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat di tengah ketidakpastian global.

Gambar II-1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tahun 2017-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2025.



Sumber : RKPD 2025

Dari gambar tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### A) Analisis Kinerja Ekonomi Sebelum dan Pasca Pandemi

##### 1. Kinerja Ekonomi Sebelum Pandemi (2017-2019)

- Pada tahun 2017, ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tumbuh sebesar 1,63%, menunjukkan pertumbuhan yang stabil di awal periode tersebut.



- Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi menguat menjadi 2,16%, menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
- Tahun 2019, tercatat sebagai tahun dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam periode ini, yaitu 3,92%, mencerminkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas dan investasi di daerah.

## 2. Dampak Pandemi dan Pemulihan Ekonomi (2020-2023);

- Tahun 2020, ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kontraksi signifikan sebesar -4,21% akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global.
- Meskipun demikian, pada tahun 2021, ekonomi daerah mampu pulih dengan pertumbuhan positif sebesar 2,67%, menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik dan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan ekonomi.
- Tahun 2022, ekonomi kembali menguat dengan pertumbuhan sebesar 3,71%, menandai pemulihan yang lebih cepat dari yang diperkirakan.
- Capaian tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif sebesar 5,13%, mencerminkan adanya momentum ekonomi yang kuat dan kepercayaan investor yang meningkat.

## B) Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 dan 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal, termasuk dampak pandemi COVID-19. Analisis laju pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi untuk tahun 2024 sebesar 5% dan tahun 2025 sebesar 5,6% akan memberikan gambaran mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi tersebut, sebagai berikut :

- Tahun 2024: Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat mempertahankan momentum positif dalam pemulihan ekonomi

pasca-pandemi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan didukung oleh investasi yang lebih baik dalam infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

- Tahun 2025: Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% menunjukkan optimisme terhadap potensi ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Dengan terus meningkatnya investasi dan perbaikan kondisi ekonomi global, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C) Dampak Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat  
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimis untuk tahun 2024 sebesar 5% dan tahun 2025 sebesar 5,6%, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ini serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pendapatan Daerah:

- Sektor Sumber Daya Alam: Tetap menjadi penyumbang pendapatan utama melalui pajak dan royalti.
- Perbaikan Sistem Perpajakan: Peningkatan dalam pengumpulan pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- Pengembangan Retribusi Daerah: Diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui penerapan retribusi yang lebih luas dan efektif.
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Potensi peningkatan pendapatan dari pajak pariwisata, retribusi pariwisata, serta pajak industri kreatif.

2. Pengurangan Kemiskinan:

- Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan terjadi penurunan tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat:

- Pembangunan yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

D) Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

1. Sumber Daya Alam: Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya batubara dan migas, yang menjadi pendorong utama ekonomi daerah.
2. Potensi Sektor Pertanian: Pengembangan sektor pertanian sebagai alternatif untuk diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor sumber daya alam.
3. Pariwisata yang Berkembang: Potensi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang kaya akan keindahan alam dan budaya, dapat menjadi sumber pendapatan baru dan menciptakan lapangan kerja.
4. Ekonomi Kreatif dan Inovasi: Stimulasi ekonomi kreatif dan inovasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan nilai tambah.

**2.1.2. Kebijakan Makro Ekonomi Daerah**

Kabupaten Kutai Kartanegara memandang penting untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikut adalah kebijakan ekonomi daerah yang diusulkan:

1. Penguatan Sektor Pertanian:

- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern dan praktik pertanian yang berkelanjutan.
- Mendukung petani lokal dengan penyediaan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang stabil.

2. Penguatan Sektor Pariwisata:

- Memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menarik wisatawan domestik dan internasional.
- Pengembangan infrastruktur pariwisata yang mendukung aksesibilitas dan pengalaman wisata yang memikat.

3. Stimulasi Sektor Ekonomi Kreatif:

- Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, seperti seni dan kerajinan, fashion, kuliner, dan industri kreatif digital.
- Memberikan dukungan dalam hal pelatihan, akses ke pasar, dan promosi produk-produk lokal.

4. Diversifikasi Sumber Daya Ekonomi:

- Mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor batubara dan migas dengan diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan dan berpotensi tinggi.
- Mendorong investasi dalam industri pengolahan hasil pertanian dan pengembangan energi terbarukan.

5. Penguatan Infrastruktur Dasar:

- Terus membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses transportasi lainnya untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi produk.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi, terutama pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berfokus pada diversifikasi sumber daya ekonomi dan penguatan infrastruktur, diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan arah kebijakan keuangan daerah sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut arah kebijakan keuangan daerah untuk diimplementasikan:

### 1. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan upaya optimalisasi dalam peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan antara lain adalah:

- Intensifikasi Pajak dan Retribusi: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan tarif yang sesuai dengan potensi daerah.
- Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi: Memperluas cakupan objek pajak dan retribusi untuk menambah sumber pendapatan daerah.
- BUMD dan BLUD: Meningkatkan Pengelola bisnis Peruda dan mengoptimalkan pendapatan BLUD.

### 2. Alokasi Belanja untuk Urusan Pemerintahan Daerah Tertentu

Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besaran anggarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prioritas alokasi belanja akan difokuskan pada:

- Anggaran Fungsi Pendidikan: Menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.
- Anggaran Fungsi Kesehatan: Memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga.

### 3. Pemenuhan Belanja untuk Prioritas Program Pembangunan

Mengedepankan program-program yang mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan

penggunaan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- Pengalokasian Sumber Daya yang Optimal: Menggunakan alokasi anggaran dengan efektif untuk memastikan setiap program dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
- Program Prioritas. Memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan didasarkan pada perencanaan yang matang sesuai dengan RKPD dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

4. Penyelasan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan RTRW

Arah kebijakan keuangan daerah diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mewujudkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang akan dilakukan mencakup:

- Alokasi Anggaran yang Tepat: Memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- Sinergi Perencanaan Ruang dan Anggaran: Menyelaraskan perencanaan ruang dengan kebijakan anggaran untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dengan mengikuti arah kebijakan keuangan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di daerah tersebut.

### BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

### 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

#### 3.1.1. Kerangka Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dua instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Asumsi dasar ekonomi yang digunakan dalam APBN memiliki dampak yang signifikan terhadap penyusunan APBD di tingkat daerah.

Asumsi dasar dalam APBN merupakan proyeksi indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran negara. Asumsi ini meliputi beberapa indikator utama, seperti dikutip dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM PPKF), sebagai berikut.

Tabel III-1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023-2025

Indikator	Realisasi 2023	APBN 2024	KEM PPKF 2025
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (% , yoy)	2,61	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 – 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580–601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003–1.047

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025



Dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM PPKF) dimaksud, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

- Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1-5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.
- Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

- Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.
- ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.
- Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu

migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Dengan demikian, asumsi dasar dalam APBN tidak hanya menjadi pedoman untuk penyusunan APBN nasional tetapi juga mempengaruhi secara langsung penyusunan APBD di tingkat daerah. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menggunakan asumsi yang realistis dan akurat adalah kunci untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan dari kedua instrumen keuangan ini dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **3.1.2. Dampak Asumsi Dasar APBN terhadap Penyusunan APBD**

Penyusunan APBD di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh asumsi dasar yang digunakan dalam APBN makro. Berikut adalah beberapa dampaknya:

1. **Proyeksi Pendapatan Daerah:** Asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi mempengaruhi proyeksi pendapatan asli daerah (PAD). Jika pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan tinggi, daerah dapat menyesuaikan proyeksi pendapatan mereka secara lebih optimis.
2. **Pengaturan Prioritas Pengeluaran:** Asumsi tentang harga komoditas dan nilai tukar mata uang mempengaruhi biaya-biaya tertentu dalam APBD, terutama dalam pembelian barang dan jasa yang terkait dengan impor.
3. **Kebijakan Fiskal dan Moneter:** Proyeksi suku bunga dan kebijakan fiskal nasional mempengaruhi tingkat bunga pinjaman yang tersedia untuk pemerintah daerah. Ini berdampak pada biaya utang dan kemampuan untuk mengakses dana tambahan dari pasar modal.
4. **Keselarasan dengan Kebijakan Nasional:** Integrasi asumsi dasar APBN makro dalam APBD daerah membantu memastikan keselarasan dengan kebijakan ekonomi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

### 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses yang krusial bagi setiap daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam menyusun rancangan APBD untuk Tahun Anggaran 2025, asumsi dasar ekonomi menjadi elemen penting yang harus diperhatikan. Asumsi dasar ini tidak bisa terlepas dari asumsi yang digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebagai bagian dari provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara juga perlu memperhatikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD Provinsi Kaltim. Asumsi dasar ini mencakup proyeksi ekonomi yang lebih spesifik terhadap kondisi regional.

Pada Tahun 2025, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2025 tergambar sebagai berikut.

Tabel III-2  
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

No.	Uraian	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50 – 6,50
2	PDRB Per Kapitas (Juta Rp)	280,00
3	Inflasi (persen)	3,00
4	Investasi Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	37,14

Sumber : Rancir RKPD Provinsi KALTIM, 2024

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah strategis yang penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini didasarkan pada berbagai asumsi dasar ekonomi yang diproyeksikan untuk membantu merumuskan kebijakan anggaran yang realistis dan efektif.

**Tabel III-3**  
**Realisasi dan Target Indikator Makro**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**  
**Tahun 2022-2025**

No	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target 2024*	Target 2025*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,31	75,30	76,59	77,23
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,96	7,61	7,53	6,97
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	4,05	3,90	3,85
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,71	5,13	4,00-5,00	5,60
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	322,08	270,72	356,37	306,68
5	Indeks Gini	0,269	0,284	0,280	0,260
7	Tingkat Inflasi (sister city Samarinda)	5.22	3.37	3.19	3.01

Sumber : RKPD 2025

Dari data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan tumbuh positif dengan kisaran 4-5 persen. Proyeksi ini didukung oleh berbagai faktor seperti peningkatan investasi, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan sektor-sektor ekonomi utama. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 5,60 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

- **Inflasi**

Inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran  $3 \pm 1$  persen. Asumsi ini mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kestabilan harga komoditas, kebijakan moneter yang efektif, dan upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan harga barang dan jasa. Stabilitas inflasi ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.

- **Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara diproyeksikan akan turun menjadi 3,85 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan

keberhasilan program-program penciptaan lapangan kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja juga diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan tingkat pengangguran.

- PDRB Perkapita

PDRB per kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara diproyeksikan menurun dari Rp 356,37 juta pada tahun 2024 menjadi Rp 306,68 juta pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan penurunan pendapatan yang berpengaruh pada daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

- Tingkat Kemiskinan

Dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan dapat ditekan hingga mencapai angka 6,97 persen pada tahun 2025. Program-program sosial dan ekonomi yang difokuskan untuk memberdayakan masyarakat miskin diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

- Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, yang dicerminkan oleh Gini Rasio, diperkirakan akan menurun menjadi 0,260 pada tahun 2025. Penurunan ketimpangan ini mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata, berkat kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Apabila berbagai indikator sosial ekonomi ini tercapai, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan akan naik menjadi 77,23 pada tahun 2025. Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

- Kesimpulan

Penyusunan asumsi dasar ekonomi dalam Rancangan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan pendapatan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Asumsi-

asumsi ini menjadi landasan bagi Pemkab Kutai Kartanegara dalam merumuskan kebijakan anggaran yang efektif, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **3.2.1. Integrasi Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara**

Dalam menyusun rancangan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2025, beberapa langkah integrasi asumsi dasar yang harus dilakukan meliputi:

1. Sinkronisasi dengan RAPBN dan RAPBD Provinsi
  - Menyelaraskan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.
  - Menggunakan estimasi inflasi yang sejalan dengan proyeksi inflasi nasional dan regional untuk memastikan perencanaan anggaran yang realistis.
2. Penyesuaian Target Pendapatan
  - Mengadopsi proyeksi pendapatan yang sesuai dengan potensi dan kondisi ekonomi lokal, dengan memperhatikan pendapatan dari sektor-sektor utama seperti pertambangan dan pertanian.
3. Perencanaan Pengeluaran
  - Menyesuaikan alokasi anggaran belanja dengan memperhatikan proyeksi inflasi dan nilai tukar rupiah yang akan mempengaruhi biaya barang dan jasa.
4. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat
  - Terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai asumsi dasar ekonomi dan kebijakan fiskal yang relevan.

Penyusunan asumsi dasar ekonomi dalam rancangan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 harus mempertimbangkan dan mengintegrasikan asumsi yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD Provinsi Kalimantan Timur. Melalui proses



sinkronisasi dan kolaborasi yang baik, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyusun APBD yang realistis, efektif, dan sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan regional, sehingga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025**

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan bagian penting dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka menyusun APBD yang efektif dan berkelanjutan untuk Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperhatikan berbagai faktor ekonomi dan sosial serta mengadopsi strategi yang tepat untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diproyeksikan berdasarkan beberapa komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berikut adalah kebijakan perencanaan pendapatan yang diproyeksikan untuk tahun 2025:

##### **1. Pajak Daerah**

###### **a. Intensifikasi**

- 1) Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online Sistem terhadap empat jenis Pajak Daerah
- 2) Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui:
  - Pendataan/updating basis data (potensi) Wajib Pajak
  - Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
- 3) Melakukan perhitungan Wajib Pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal
- 4) Melakukan penagihan piutang pajak

###### **b. Ekstensifikasi**

- 1) Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak-pajak daerah yang potensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- 3) Peningkatan koordinasi kelembagaan, melalui:
  - Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah

- Koordinasi dalam rangka Penegakan hukum (law enforcement)
- Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak

## 2. Kebijakan Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah :

- 1) Perluasan basis penerimaan retribusi daerah dengan mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi yang lebih realistis dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
- 2) Perkuatan proses pemungutan dengan cara perbaharuan tarif sesuai perkembangan ekonomi dan tarif ditinjau kembali serta peningkatan SDM pemungut.
- 3) Pelaksanaan efisiensi pemungutan dan penekanan biaya pemungutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.
- 4) Peningkatan penerimaan dan perbaikan perencanaan melalui peningkatan koordinasi antara Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan retribusi serta pendataan wajib retribusi.

## 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- 2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan daerah.

## 4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Beberapa arah kebijakan dalam meningkatkan pendapatan dari dari komponen ini, sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang mempunyai nilai ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga, penjualan aset daerah, pendapatan jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan sewa dan lain-lain pendapatan.
- 2) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

## 5. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 difokus pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada, peningkatan efisiensi pemungutan, penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan strategi yang tepat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk membiayai program-program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

### 4.2.1. Realisasi Pendapatan dan Target Anggaran 2024

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. target pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, berdasarkan data realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020-2023 hingga target anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-1  
Rata-Rata Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tahun 2020-2023 dan Anggaran Tahun 2024

Uraian	Realisasi				Anggaran TA.2024
	TA.2020	TA.2021	TA.2022	TA.2023	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.976.869.503.283</b>	<b>3.689.893.245.759</b>	<b>6.773.479.020.245</b>	<b>7.735.629.987.009</b>	<b>11.956.250.834.000</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>459.195.872.565</b>	<b>430.783.242.768</b>	<b>567.762.071.164</b>	<b>926.949.182.461</b>	732.901.415.061
Pendapatan Pajak Daerah	110.194.251.506	114.967.277.996	142.595.205.607	141.989.565.534	160.000.000.000
Pendapatan Retribusi Daerah	4.072.245.146	4.008.704.812	5.332.179.084	6.278.232.985	7.542.820.000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.691.627.512	19.593.267.856	21.232.144.049	63.147.803.557	32.000.000.000
Lain-lain PAD Yang Sah	326.237.748.401	292.213.992.104	398.602.542.424	715.533.580.385	533.358.595.061
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.517.673.630.718</b>	<b>3.259.110.002.991</b>	<b>6.205.716.949.081</b>	<b>6.800.950.076.148</b>	<b>10.973.349.418.939</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.179.794.432.606	2.858.990.200.991	5.637.081.367.645	5.935.454.199.771	10.170.308.875.939
Transfer Antar Daerah	337.879.198.112	400.119.802.000	568.635.581.436	865.495.876.377	803.040.543.000
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.730.728.400</b>	<b>250.000.000.000</b>
Pendapatan Hibah	-	-	-	3.567.000.000	
Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	4.163.728.400	250.000.000.000

Sumber : RKPD 2025

#### 4.2.2 Estimasi Pendapatan Tahun 2025

Melihat tren peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilakukan estimasi target pendapatan untuk tahun 2025. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024, proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta berbagai kebijakan fiskal dan strategi yang akan diterapkan, target pendapatan daerah untuk tahun 2025 diperkirakan akan meningkat secara substansial.

Berdasarkan data tersebut, setidaknya dapat diperkirakan pendapatan daerah tahun 2025. Total pendapatan daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.7316.742.483.061,00 dengan perincian meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.097.676.415.061, yang terurai atas :
  - 1) Pendapatan pajak daerah sebesar Rp274.775.000.000
  - 2) Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp4.837.656.000
  - 3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah sebesar Rp44.145.888.234
  - 4) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp773.917.870.827
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp6.219.066.068.000, terdiri atas :
  - 1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp5.369.066.068.000 dan merupakan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan.
  - 2) Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp850.000.000.000, berasal dari pendapatan bagi hasil saja dan belum memperhitungkan pendapatan yang berasal bantuan keuangan.

Target pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 7,31 Triliun. Target ini terdiri dari Rp 1,09 Triliun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp 6,21 Triliun dari Pendapatan Transfer. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, target ini diharapkan dapat tercapai untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Perencanaan belanja merupakan bagian integral dari pengelolaan anggaran dalam suatu entitas pemerintahan, baik itu di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Rencana belanja yang baik tidak hanya mengatur pengeluaran untuk operasional dan investasi, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan mendesak serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Perencanaan belanja, dengan fokus pada Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.

##### **1. Rencana Belanja Operasi (RBO)**

Rencana Belanja Operasi mencakup pengeluaran rutin untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari, seperti gaji pegawai, biaya administrasi, dan biaya operasional lainnya. Kebijakan terkait RBO mencakup:

- Pengendalian Pengeluaran: Menetapkan batasan dan kontrol yang ketat terhadap pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.
- Efisiensi Biaya: Mendorong penggunaan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan hasil dari setiap unit pengeluaran.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa setiap pengeluaran dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

##### **2. Rencana Belanja Modal (RBM)**

Rencana Belanja Modal digunakan untuk investasi jangka panjang dalam aset tetap yang berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan investasi dalam sumber daya manusia. Kebijakan terkait RBM meliputi:

- Prioritas Pembangunan: Menetapkan prioritas dalam pengembangan infrastruktur yang akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi lokal.



- Pengelolaan Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam pelaksanaan proyek modal untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan atau penundaan.
- Pembiayaan yang Berkelanjutan: Mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung proyek-proyek modal tanpa mengorbankan keseimbangan keuangan jangka panjang.

### 3. Rencana Belanja Transfer (RBT)

Rencana Belanja Transfer mengatur alokasi dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah atau antar daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kebijakan terkait RBT meliputi:

- Pengaturan Dana Perimbangan: Menetapkan mekanisme yang adil dan transparan dalam pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Optimalisasi Pemanfaatan: Mendorong pemanfaatan dana transfer untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
- Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana transfer untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

### 4. Rencana Belanja Tidak Terduga (RBD)

Rencana Belanja Tidak Terduga merujuk pada dana yang dialokasikan untuk menghadapi situasi darurat atau kejadian tak terduga yang membutuhkan intervensi segera. Kebijakan terkait RBD mencakup:

- Ketersediaan Dana Cadangan: Memastikan ketersediaan dana cadangan yang mencukupi untuk merespons keadaan darurat tanpa mengganggu kelangsungan operasional pemerintah.
- Ketelitian dalam Penggunaan: Menggunakan dana tidak terduga dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi situasi darurat.
- Akuntabilitas Publik: Melakukan pelaporan dan akuntabilitas secara terbuka kepada publik mengenai penggunaan dana tidak terduga.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan, maka yang menjadi sasaran pembangunan pada tahun 2025 hanya sasaran yang terkait dengan prioritas pembangunan dengan indikator dan target yang telah disesuaikan berdasarkan capaian realisasi 2023 dan target RPJMD tahun 2025. Prioritas, fokus, sasaran beserta target pembangunan tahun 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel V-1  
Prioritas, Fokus, Sasaran dan Target Pembangunan  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

PRIORITAS KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA		FOKUS PEMBANGUNAN		TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET RPJMD 2025	TARGET RKPD 2025
				Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	62,74	-	B (65,00)	B (65,00)
1	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8,38	-	6,80	8,50
		2	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,81	-	9,00	9,86
				Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	74,67	75,30	76,2	76,59
2	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	3	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	3	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	47,42	-	51,5	57,0
		4	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan	4	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kesehatan	0,81	0,812	0,821	0,821

PRIORITAS KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA		FOKUS PEMBANGUNAN		TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET RPJMD 2025	TARGET RKPD 2025
			dan Pendidikan yang bermutu		Kesehatan Masyarakat					
				Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kebahagiaan	78,83	-	74	80	
					Tingkat Kemiskinan	7,96	7,61	6,40	6,97	
3	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	5	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah	5	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,747	0,779	0,765	0,80
4	Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	6	Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda	6	Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,14	4,05	4,25	3,85
						PDRB PerKapita	254,50	270,72	202,16	381,63
				Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan PDRD Non Migas dan Batubara	5,37	-	5,72	5,72	
5	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	7	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan	7	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	3,74	6,60	4,00	4,10
		8	Peningkatan produktivitas industri kreatif	8	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,96	6,80	7,48	7,48
				Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	37,8	-	32,8	38	
					Persentase Kawasan Kumuh	0,0058	-	0,0055	0,0055	
6	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	9	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	9	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	75,65	-	87,18	80,00

Sumber : RKPD 2025

Perencanaan belanja dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2025 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga. Setiap jenis belanja memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang baik, diharapkan APBD dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dalam merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengambil berbagai pertimbangan berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun-tahun sebelumnya serta target belanja daerah pada tahun 2024. Perkiraan belanja daerah pada tahun 2025 diestimasi sebesar Rp7.584.182.483.061,- yang terdiri dari beberapa jenis seperti : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.

### 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Rincian belanja operasi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai, diestimasi sebesar Rp2.423.237.545.232,- antara lain dialokasikan untuk Belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja tambahan penghasilan ASN, Belanja gaji dan tunjangan DPRD, Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, diestimasi sebesar Rp2.604.983.283.393,- antara lain dialokasikan untuk Belanja barang, Belanja jasa, Belanja pemeliharaan, Belanja perjalanan dinas, Belanja uang dan/atau jasa untuk pihak ketiga/Masyarakat.
- 3) Belanja Hibah, diestimasi sebesar Rp36.438.881.000,- dialokasikan diantaranya untuk Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik:
- 4) Belanja Bantuan Sosial, diestimasi sebesar Rp3.517.200.000,-, dialokasikan diantaranya untuk Belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga/kelompok Masyarakat.

### 2. Belanja Modal

Belanja Modal diestimasi sebesar Rp1.697.714.324.257,- Belanja ini dialokasikan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah, salah satunya yaitu Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

### 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga diestimasi sebesar Rp50.000.000.000,- Belanja ini digunakan untuk keadaan darurat atau keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Alokasi belanja ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kebutuhan mendesak yang dapat menimbulkan kerugian besar jika ditunda.

### 4 Belanja Transfer

Belanja Transfer diestimasi sebesar Rp768.008.249.179,- Belanja ini merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau kepada pemerintah desa, tergantung dari penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga untuk tahun anggaran 2025 dibuat dengan mempertimbangkan realisasi belanja daerah pada beberapa tahun sebelumnya serta target belanja pada tahun 2024. Dengan alokasi yang sesuai dan pengawasan yang ketat, diharapkan rencana belanja ini dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Alokasi yang tepat pada setiap jenis belanja akan memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan publik untuk kepentingan bersama.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan anggaran dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam kaitan ini, telah dirumuskan arah kebijakan pembiayaan daerah yang terdiri dari dua komponen utama: kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk menutupi defisit anggaran. Dalam praktiknya, kebijakan ini dibatasi pada pemanfaatan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagai sumber utama. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Pemanfaatan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA)**

- Optimalisasi Penggunaan SiLPA: SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi pada tahun anggaran berjalan. Ini mencakup sisa anggaran yang tidak terpakai dari tahun sebelumnya.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Penggunaan SiLPA dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan dana harus dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Monitoring dan Evaluasi: Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan SiLPA digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

##### **2. Sumber Penerimaan Lainnya selain SiLPA, penerimaan pembiayaan daerah dapat juga bersumber dari beberapa sumber lain seperti:**

- Pencairan Dana Cadangan: Dana cadangan yang sudah dibentuk dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran.
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Penjualan aset-aset daerah yang tidak produktif dapat menjadi sumber penerimaan tambahan.
- Penerimaan Pinjaman Daerah: Meminjam dana dari pemerintah pusat, atau lembaga keuangan, untuk mendanai proyek-proyek penting.

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah: Dana yang diterima kembali dari pinjaman yang diberikan sebelumnya.
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya: Sumber-sumber lain yang sesuai

## **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk mengantisipasi surplus anggaran. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa surplus anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

### **1. Pengelolaan Surplus Anggaran**

- Investasi pada Infrastruktur dan Layanan Publik: Surplus anggaran dialokasikan untuk investasi pada infrastruktur dan layanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Rencana Penggunaan Surplus: Menyusun rencana penggunaan surplus anggaran secara jelas dan terperinci agar dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif.

### **2. Penyimpanan Dana Cadangan**

- Pembentukan Dana Cadangan: Dana cadangan dibentuk untuk mengantisipasi kebutuhan darurat atau tidak terduga di masa mendatang.
- Pengelolaan Dana Cadangan yang Efektif: Dana cadangan dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan investasi yang aman.

Kebijakan pembiayaan daerah dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel. Melalui kebijakan penerimaan pembiayaan yang memanfaatkan SiLPA dan sumber-sumber lainnya, serta kebijakan pengeluaran pembiayaan yang mengantisipasi surplus anggaran, Pemkab Kutai Kartanegara dapat menjaga keseimbangan anggaran dan mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah merumuskan kebijakan umum APBD Tahun 2025 yang mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Untuk mencapai target yang telah direncanakan, diperlukan strategi pencapaian yang komprehensif dan terfokus. Berikut adalah strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025:

#### **1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah tulang punggung keuangan yang mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan langkah-langkah kongkrit berikut ini:

##### **1) Pembaruan Data Pajak dan Retribusi Daerah**

- Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dilakukan secara berkala untuk mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memperluas basis pajak.

##### **2) Pengembangan Layanan Pajak Daring**

- Mengembangkan sistem pelayanan pajak daerah dengan memperkenalkan pembayaran pajak secara daring. Langkah ini akan diterapkan secara bertahap untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak.

##### **3) Pemanfaatan Teknologi Informasi**

- Menerapkan teknologi informasi dalam sistem pemungutan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara potensi dan realisasi pendapatan pajak.

##### **4) Evaluasi Potensi dan Penetapan Tarif**

- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap potensi pajak dan retribusi daerah serta menyesuaikan tarif sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan daerah secara optimal.

### 5) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

- Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan.

### 6) Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUMD

- Memperketat pengawasan dan memberikan pembinaan yang intensif terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan.

### 7) Optimasi Penerimaan Dana Perimbangan

- Mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat secara teratur untuk memastikan penerimaan dana perimbangan maksimal sesuai dengan kondisi aktual Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah yang efisien dan efektif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Berikut adalah strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target belanja daerah pada tahun 2025:

### 1) Alokasi Anggaran untuk Urusan Pemerintahan Daerah Tertentu

- Mengalokasikan anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

### 2) Prioritaskan Program Prioritas

- Mengedepankan program-program prioritas yang mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025. Prioritas ini mencakup pengembangan infrastruktur, Pertanian dan Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.

## 3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan aspek krusial dalam menjaga kestabilan fiskal daerah dan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan. Untuk

mencapai target pembiayaan daerah pada tahun 2025, Kabupaten Kutai Kartanegara akan menerapkan strategi sebagai berikut:

1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Mengintensifkan upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperluas sumber-sumber pendapatan dan meningkatkan efisiensi pengumpulan.

2) Optimasi Penerimaan Pendapatan Transfer

- Melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melampaui target penerimaan pendapatan transfer. Kolaborasi ini penting untuk memaksimalkan dana yang tersedia untuk pembangunan daerah.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara optimis dapat mencapai target yang telah direncanakan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2025. Langkah-langkah konkret tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan efisiensi belanja, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rancangan KUA Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun merupakan hasil dari upaya kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan tema "Pemerataan Pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan".

Dalam proses penyusunannya, mempertimbangkan berbagai aspek strategis yang meliputi pertumbuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan yang diidentifikasi melalui konsultasi dan dialog partisipatif dengan berbagai stakeholder. Kami berharap bahwa nota kesepakatan ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk penyusunan PPAS serta RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025.

Setiap komponen belanja, mulai dari Belanja Operasi yang mendukung pelayanan publik hingga Belanja Modal yang membangun infrastruktur, serta Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga yang memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan daerah, telah diatur dengan cermat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Semoga proses pembahasan selanjutnya dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi semua pihak dalam menyusun rencana anggaran yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 15 Juli 2024

  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
  
EDI DAMANSYAH



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN ANGGARAN  
**2025**